

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Hal yang melatar belakangi terjadinya pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 0456/Pdt.G/2011/PA.Ska ialah karena para pihak terbukti melanggar larangan kawin yang mana pada mulanya para pihak tidak mengetahui bahwa mereka saudara sepersusuan dan baru mengetahui itu setelah menjalani perkawinan. Akan tetapi, baik para pihak maupun orang tua para pihak tidak mengetahui bahwa saudara sepersusuan tidak diperbolehkan menikah. Hal itu baru diketahui dipersidangan ketika Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dan terdapat dalam posita nomor 5 bahwa Termohon dan Pemohon pernah satu susuan. Karena itu Majelis hakim menolah permohonan cerai talak yang dimohonkan Pemohon dan membatalkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon.
2. Pertimbangan hakim dalam menentukan perkara pembatalan perkawinan meliputi kewenangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara, upaya Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak, Majelis Hakim menyatakan pokok permasalahan dalam perkara pembatalan ini adalah karena Pemohon dan Termohon adalah saudara sesusuan, dan majelis hakim menimbang bahwa karena perkawinan Pemohon dan Termohon dibatalkan maka posita dan petitum yang berhubungan dengan masalah cerai talak tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pembatalan nikah pemohon cukup menggunakan petitum subsider yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya

3. Status anak dalam putusan Nomor 0456/Pdt.G/2011/PA.Ska ialah sah karena Pasal 53 KHI memperbolehkan pernikahan dalam keadaan hamil. Namun apabila dibahas dalam hukum Islam, melangsungkan perkawinan dalam keadaan hamil dan wanita tersebut adalah saudara sesusuaannya hukumnya ialah haram dan anaknya tidak memiliki nasab dengan ayahnya. Sedangkan status harta perkawinan akaibat pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 0456/Pdt.G/2011/PA.Ska termasuk kepada harta bersama yang mana pembagiannya diserahkan kepada para Pihak apakah ingin dibagi dalam persidangan atau dibagi sendiri karena pada dasarnya dalam putusan Nomor 0456/Pdt.G/2011/PA.Ska ini tidak menyinggung mengenai harta perkawinan dan oleh sebab itu Majelis Hakim juga tidak memiliki wewenang untuk memutuskan apa yang tidak dimohonkan oleh Pemohon dan juga tidak memiliki wewenang untuk memprovokasi para pihak.

SARAN

- 1) Hendaknya sebelum kita melangsungkan perkawinan terlebih dahulu memperhatikan indikasi atau apapun yang sekiranya dapat membatalkan perkawinan. Hal ini bertujuan sebagai tindakan hati-hati dan juga untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadha dan rahmah.
- 2) Perlu adanya pengaturan tersendiri mengenai anak hasil dari perkawinan yang memiliki hubungan kekerabatan seperti perkawinan saudara sepersusuan, karena hal ini lebih spesifik dan berbeda dari pembatalan perkawinan biasa yang hanya karena kurangnya syarat-syarat pada umumnya hal ini penting untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban yang jelas antara anak dan orang tuanya.